PERANAN PSIKOLOGI SOSIAL DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YANG BERKELANJUTAN

Artika Cesar Aura Devi ^{1*}, Chyntia Martini², Nadia Karin³, Zahra Permata Sari⁴,
Sulistiasih,⁵

Fakultas Psikologi, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia

202310515034@mhs.ubharajaya.ac.id¹, 202310515024@mhs.ubharajaya.ac.id²

202310515027@mhs.ubharajaya.ac.id³, 202310515030@mhs.ubharajaya.ac.id⁴

Sulistiasih77@gmail.com⁵

ABSTRACT

Community empowerment is a process of providing power in the form of opportunities, knowledge, skills and materials, thereby making the powerless become powerful or helping to increase the ability, capacity and self-confidence of the community so that they have the power/strength to overcome the problems they face in order to achieve a better life, so that they can determine a future that suits their wishes. This is where the role of the government, through government efforts, assistance and intervention, is hoped that the community will become more empowered, which in turn will make the people more prosperous in life. The phenomenon of social psychology in empowerment and community development which refers to how individuals and groups interact in a social context, and how these interactions influence behavior, identity and community welfare. In the context of community empowerment and development, social psychology plays an important role in understanding and overcoming various social and economic challenges. Social psychology also helps in understanding how socialization, social norms, and social identity influence individual and group behavior. In addition, it can be used to develop effective strategies to improve the social and economic welfare of society.

Keywords: Community Empowerment, Social Psychology, Economics and Government.

ABSTRAK

Pemberdayaan Masyarakat adalah suatu proses pemberian daya (power) berupa kesempatan atau peluang, pengetahuan, keahlian, dan materi, sehingga membuat yang tidak berdaya (powerless) menjadi memiliki kekuasaan (powerfull) atau membantu meningkatkan kemampuan, kapasitas, dan rasa percaya diri masyarakat sehingga mereka mempunyai Daya/kekuatan untuk mengatasi permasalahan yang mereka hadapi dalam rangka mencapai Kehidupan yang lebih baik, sehingga dapat menentukan masa depan yang sesuai dengan keinginan mereka. Disinilah peran pemerintah melalui upaya, bantuan, dan intervensi pemerintah diharapkan masyarakat akan semakin berdaya, yang pada gilirannya rakyat menjadi lebih sejahtera dalam kehidupan. Fenomena psikologi sosial dalam pemberdayaan dan pembangunan masyarakat yang merujuk pada bagaimana individu dan kelompok berinteraksi

¹ Korespondensi Penulis.

dalam konteks sosial, dan bagaimana interaksi tersebut mempengaruhi perilaku, identitas, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks pemberdayaan dan pembangunan masyarakat, psikologi sosial memainkan peran penting dalam memahami dan mengatasi berbagai tantangan sosial dan ekonomi. Psikologi sosial juga membantu dalam memahami bagaimana sosialisasi, norma sosial, dan identitas sosial mempengaruhi perilaku individu dan kelompok. Selain itu, dapat digunakan untuk mengembangkan strategi yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat.

Kata Kunci: Pemberdayaan Masyarakat, Psikologi Sosial, Ekonomi dan Pemerintah.

PENDAHULUAN

Pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu fokus utama dalam pembangunan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan dan mewujudkan kesejahteraan hidup. Dalam konteks ini, psikologi sosial berperan penting dalam memahami dan memengaruhi dinamika individu dan kelompok dalam proses pemberdayaan. Psikologi sosial menawarkan berbagai konsep dan teori yang dapat membantu memahami perilaku individu dan kelompok dalam konteks pemberdayaan masyarakat. Konsep-konsep seperti norma sosial, identitas sosial, kognisi sosial, dan pengaruh sosial dapat memberikan wawasan tentang bagaimana individu dan kelompok berinteraksi, membuat keputusan, dan bertindak dalam upaya pemberdayaan. Pengetahuan tentang psikologi sosial dapat membantu praktisi pemberdayaan masyarakat dalam merancang program dan intervensi yang lebih efektif. Dengan memahami faktor-faktor psikologis yang mendasari perilaku individu dan kelompok, praktisi dapat mengembangkan strategi yang tepat untuk mendorong partisipasi masyarakat, membangun rasa memiliki, dan meningkatkan kapasitas kolektif.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah literature review atau studi literatur. Data penelitian didapatkan melalui tinjauan pustaka dan studi empiris pada beberapa jurnal penelitian sebelumnya yang berfokus pada pengaruh psikologi sosial dalam pemberdayaan masyarakat.

Pengumpulan data menggunakan pencarian website Google Scholar & Artikel sebagai sumber data.

HASIL PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan studi literatur yang terdiri dari 9 jurnal nasional. Hasil data diperoleh dari pencarian website Google Scholar sebesar 90% & Artikel 10%. Dengan jurnal yang membahas mengenai pengaruh psikologi sosial dalam

pemberdayaan masyarakat sebanyak 9 jurnal nasional sebagai sumber data dan dianalisis secara mendalam sehingga dapat diambil kesimpulan dan temuan dalam penelitian.

PEMBAHASAN

Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan atau empowerment merupakan sebuah konsep yang fokusnya adalah hal kekuasaan (power). Pemberdayaan apapun asumsinya adalah menerima adanya kekuasaan sebagai faktor, dan membuat yang tidak berkuasa menjadi memiliki kekuasaan, yaitu yang powerless diberi power melalui empowerment sehingga menjadi powerful (Pranarka dalam Prijono dan Pranarka, 1996 : 261262). Konsep Pemberdayaan pada perkembangannya memiliki banyak definisi yang dikemukakan oleh para ahli yang memiliki komitmen tinggi terhadap usaha memajukan kesejahteraan masyarakat, seperti yang dikemukakan oleh Ife (1995 : 182), yaitu empowerment Means providing people with the resource, opportunities, knowledge and skills to increase their capacity to determine their own future, and to participate in and affect the life of their community (pemberdayaan berarti menyiapkan kepada masyarakat berupa sumberdaya, kesempatan, pengetahuan, dan keahlian untuk meningkatkan kapasitas diri masyarakat di dalam menentukan masa depan mereka, serta untuk berpartisipasi dan mempengaruhi kehidupan dalam Komunitas masyarakat itu sendiri Pemberdayaan menurut pengertian diatas menunjukkan upaya dari suatu pihak dalam menggerakkan partisipasi masyarakat dan memperkuat kemampuan masyarakat lapisan bawah yang masih berada dalam kondisi tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan, keterbelakangan, dan membutuhkan pertolongan agar lebih berdaya dalam kemandirian, keswadayaan, partisipasi, dan demokratisasi. Dalam pengertian tersebut, Ife (1995 : 62) menyimpulkan bahwa empowering is about increasing the power of the disadvantaged (pemberdayaan adalah mengenai peningkatan kekuatan dari kelemahan).

Dalam konteks yang lebih luas, dapat juga dikatakan bahwa pemberdayaan adalah suatu proses memperoleh daya (power) melalui pengalaman, pengetahuan, sumber daya, dan kesadaran, sehingga mereka yang tak berdaya (powerless) akan mendapat kekuasaan (powerful) selain itu, membantu meningkatkan kemampuan, kapasitas, dan kesadaran masyarakat. masyarakat umum agar mempunyai Daya/kekuatan untuk menghadapi tantangan yang dihadapinya dalam mencapai kualitas hidup yang lebih baik, sehingga mereka dapat menentukan masa depannya sendiri sesuai dengan keinginannya. Sebagai hasil dari tindakan, undang-undang, dan intervensi pemerintah, masyarakat diharapkan menjadi lebih sejahtera dan menjadi lebih mandiri. Dalam konteks perubahan program, kontribusi pemerintah adalah upaya membantu masyarakat dengan memberikan penitipan anak (seperti sumber

daya keuangan, waktu, pengetahuan, dan bantuan) kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan kapasitas, kemampuan, dan diri mereka sendiri. -kesadaran dan lebih mampu menghadapi tantangan penuaan yang sedang berlangsung untuk mencapai kualitas hidup yang lebih tinggi.

Proses Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Pranarka dan Moeljarto (1996:56-57), proses pemberdayaan masyarakat mengandung 2 (dua) kecenderungan yaitu:

- 1) Proses Pemberdayaan yang menekankan kepada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan, atau kemampuan kepada masyarakat, agar individu menjadi lebih berdaya. Proses ini dapat dilengkapi pula dengan upaya membangun asset material guna mendukung pembangunan kemandirian mereka melalui organisasi. Kecenderungan ini disebut kecenderungan primer dari makna pemberdayaan.
- 2) Kecenderungan yang kedua atau kecenderungan sekunder adalah mekankan pada proses menstimulasi, mendorong, atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog.

Tahapan Pemberdayaan Masyarakat

Menurut (Sulistiyani, 2004). Pemberdayaan masyarakat sebagai upaya peningkatan kapasitas masyarakat secara berkelanjutan dilakukan melalui tahapan-tahapan berikut ini.

- a) Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli.
- b) Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan-keterampilan agar terbuka wawasan, dan memberikan keterampilan dasar.
- c) Tahap peningkatan kemampuan intelektual dan kecakapan-keterampilan, sehingga terbentuk inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian.

Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Sumodiningrat(2000 : 109) tujuan dari pemberdayaan masyarakat adalah:

1. Meningkatnya peningkatan pendapatan masyarakat di tingkat bawah dan menurunnya jumlah penduduk yang terdapat di bawah garis kemiskinan,
2. Berkembangnya kapasitas masyarakat untuk meningkatkan kegiatan sosial ekonomi produktif masyarakat di pedesaan, dan

3. Berkembangnya kemampuan masyarakat dan meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat, baik aparat maupun warga. Dalam kaitan di atas, Moeljarto (1996: 132) menyatakan bahwa masyarakat miskin dianggap berdaya bila ia mampu meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia peningkatan kemampuan pemodal, pengembangan usaha, dan pengembangan kelembagaan usaha bersama dengan menerapkan prinsip gotong royong. Keswadayaan, dan partisipasi.

Diharapkan pula peranan pemerintah dapat mencapai tujuan dari pemberdayaan masyarakat seperti di atas, paling tidak : dapat meningkatkan pendapatan masyarakat di tingkat bawah di daerah yang bersangkutan (melalui dukungan pemberdayaan ekonomi), dapat mengembangkan kapasitas atau kemampuan warga masyarakat di daerah untuk peningkatan kegiatan sosial-ekonomi produktif warga setempat dan peningkatan kapasitas kelembagaan warga tersebut (melalui pemberdayaan pendidikan, dan didukung dengan pemberdayaan social budaya, psikologi, dan politik warga).

Dalam pelaksanaannya, pemberdayaan masyarakat menurut Midgley (1995 : 103-138) mengatakan ada tiga strategi besar dalam pembangunan sosial, yaitu : (1) Pembangunan sosial melalui individu (*social development by individuals*), dimana individu-individu dalam masyarakat secara swadaya membentuk usaha pelayanan masyarakat guna memberdayakan masyarakat. Pendekatan ini lebih mengarah pada pendekatan individual atau perusahaan (*individuals or enterprise approach*); (2) Pembangunan social melalui komunitas (*social development by communitites*), dimana kelompok masyarakat secara bersama-sama berupaya mengembangkan komunitas lokalnya. Pendekatan ini lebih dikenal dengan nama pendekatan komunitarian (*communitarian approach*); dan (3) Pembangunan sosial melalui pemerintah (*social development by governments*), dimana pembangunan sosial dilakukan oleh lembaga-lembaga di dalam organisasi pemerintah (*governmental agencies*). Pendekatan ini lebih dikenal dengan nama pendekatan statis (*statist approach*). Dengan demikian, tidak hanya pemerintah, tetapi individu dan komunitas juga ikut berperan dalam pemberdayaan.

Fenomena Psikologi Sosial dalam Pemberdayaan Masyarakat

Fenomena psikologi sosial dalam pemberdayaan dan pembangunan masyarakat merujuk pada bagaimana individu dan kelompok berinteraksi dalam konteks sosial, dan bagaimana interaksi tersebut mempengaruhi perilaku, identitas, dan kesejahteraan masyarakat. Psikologi sosial adalah cabang ilmu yang mempelajari hubungan antara individu dan kelompok serta bagaimana hal tersebut mempengaruhi perilaku dan pemikiran. Dalam konteks pemberdayaan dan

pembangunan masyarakat, psikologi sosial memainkan peran penting dalam memahami dan mengatasi berbagai tantangan sosial dan ekonomi. Psikologi sosial membantu dalam memahami bagaimana sosialisasi, norma sosial, dan identitas sosial mempengaruhi perilaku individu dan kelompok. Ini mencakup pemahaman tentang bagaimana individu dan kelompok memahami dan merespons lingkungan sosial mereka, serta bagaimana mereka berinteraksi dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Dalam konteks pemberdayaan dan pembangunan masyarakat, psikologi sosial dapat digunakan untuk mengembangkan strategi yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat.

Pemberdayaan artinya penguatan dan kata pemberdayaan identik dengan kata pengembangan. Sementara itu, jika ditinjau secara etimologis, maka istilah “pemberdayaan” asalnya dari kata “power” artinya kekuatan atau kemampuan, kata tersebut berarti proses tertuju pemberdayaan, serta penerapan kekuatan dan kemampuan dalam proses mendapatkan kekuasaan atau kekuatan proses. Dapat disimpulkan, kekuasaan pihak yang berwenang terhadap pihak yang lebih lemah dan tidak berdaya. Istilah “pemberdayaan” mengandung pengertian jika unsur pokok pemberdayaan berasal dari komunitas, selain itu komunitas mencari, melaksanakan, membuat suasana serta menuntut kekuasaan atau kekuatan dari pihak lain.

Menurut Mc. Ardle, pemberdayaan sebagai proses berkumpulnya anggota masyarakat untuk mengambil keputusan dan kemudian menjalankan keputusan itu dengan konsisten. Oleh karena itu, pemberdayaan hakikat berfokus pada gimana individu, kelompok, atau masyarakat umum dapat mengambil keputusan mengenai kehidupannya sendiri dan rencana masa depannya sesuai dengan keinginannya sendiri. Jika pengembangan masyarakat diartikan sebagai “suatu proses yang dilaksanakan dalam bermacam bentuk kegiatan kemasyarakatan dengan tujuan untuk memberdayakan masyarakat agar dapat lebih memanfaatkan seluruh sumber daya yang ada, termasuk potensi alam dan energi lalu sumber daya eksplorasi lokal, maka hal inilah yang dimaksud dengan pengembangan masyarakat. itu berarti inisiatif masyarakat, melakukan lebih banyak kegiatan dan investasi untuk mencapai standar hidup yang tinggi.

Dalam artian lain pengembangan adalah suatu upaya memperluas horizon pilihan bagi masyarakat. Melihat dan memilih sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya, Sebagaimana masyarakat. Pemberdayaan dipandang dalam konteks ini sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kehidupan manusia. Pemberdayaan juga mengacu pada sekelompok orang yang bergerak ke arah yang lebih positif untuk mencapai tujuan tersebut, yang meliputi peningkatan taraf hidup, mencapai keamanan finansial, dan membina kesejahteraan spiritual dan material di antara seluruh anggota masyarakat.

Menurut (Sulistiyani, 2004), Pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya, proses memperoleh daya, atau proses pemberian daya dari

pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya. Pengertian “proses” menunjuk pada serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang dilakukan secara kronologis-sistematis yang mencerminkan tahapan upaya mengubah masyarakat yang kurang atau belum berdaya menuju keberdayaan.

A. Upaya Pemberdayaan Masyarakat dalam pekerjaan dan usaha yang perlu dilakukan untuk menyukseskan pekerjaannya meliputi 3 aspek yaitu:

- 1) **Enabling** adalah upaya pemberdayaan dengan menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Pada aspek ini yang perlu menjadi asumsi adalah jika para individu masyarakat mempunyai potensi yang bisa berkembang. Pada aspek ini usaha pemberdayaan yang dilaksanakan adalah dengan memberikan dorongan, motivasi dan menyadarkan masyarakat mengenai potensi yang dimiliki dan usaha yang dapat dilakukan untuk mengembangkannya.
- 2) **Empowering** adalah proses pemberdayaan dengan meningkatkan kapasitas yang dimiliki masyarakat luas. Peningkatan kapasitas ini dilakukan dengan memaksimalkan potensi atau daya yang dimiliki masyarakat. Pendekatan ini terdiri dari pernyataan-pernyataan seperti memberikan berbagai masukan (input) dan membuka akses terhadap berbagai sumber daya yang dapat mengubah suatu masyarakat menjadi berdaya. Dalam bidang ekonomi, contoh yang dapat diberikan adalah informasi, tenaga kerja, dan pasar. Pada bidang pendidikan maka masukan yang dapat diberikan dapat berupa sekolah dan perpustakaan.
- 3) **Protecting** merupakan upaya preventif yang meliputi penguatan sistem pertahanan masyarakat terhadap sebagian populasi yang diserang. Dalam proses pemberdayaan, permasalahan yang sudah muncul perlu diatasi. Pelindungan dipandang sebagai usaha dalam menghentikan akan ada persaingan tak setara dan eksploitasi besar-besaran terhadap wilayah yang lebih lemah. Memperhatikan aspek ini dapat dilakukan dengan membuat suatu sistem atau peraturan—peraturan yang berkaitan dengan hal yang perlu dilindungi.

Asas Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Ife dan Tesoriero (2006) pemberdayaan masyarakat juga memiliki asas – asas atau prinsip – prinsip yang menjadi pijakan pelaksanaannya. Terdapat beberapa asas yang perlu dijadikan sebagai landasan dalam subyek pemberdayaan untuk merencanakan pengembangan masyarakat yaitu:

1. Komunitas dilibatkan dalam setiap proses pengambilan keputusan.

2. Mensinergikan strategi komprehensif pemerintah, pihak – pihak terkait dan partisipasi warga.
3. Membuka akses warga atas bantuan profesional, teknis, fasilitas, dan insentif lainnya yang dapat meningkatkan partisipasi masyarakat.
4. Mengubah perilaku profesional untuk lebih peka pada kebutuhan, perhatian dan gagasan warga komunitas.

Implementasi Pemerintahan dalam Pemberdayaan Masyarakat

Ada 5 komponen penting yang harus dilakukan pemerintah, yaitu:

1. Pemberdayaan Pendidikan. Pendidikan merupakan kunci pemberdayaan masyarakat. Oleh karena pendidikan dapat meningkatkan pendapatan' kesehatan, dan produktivitas. Seringkali masyarakat berpendidikan rendah yang salah satu penyebabnya adalah faktor ekonomi, karena dalam pendidikan itu sendiri membutuhkan biaya yang cukup banyak/memadai. Dalam kaitan itu, Koswara(2001 : 88-89) menyatakan bahwa hal-hal yang perlu diperankan oleh pemerintah daerah dalam konteks pemberdayaan pendidikan rakyat adalah:
 - a) Melakukan upaya peningkatan pengetahuan rakyat melalui suatu program yang ditunjang dengan penyiapan/ penyediaan sarana pendidikar formal yang memadai.
 - b) Melakukan upaya peningkatan keterampilan rakyat melalui suatu program, peningkatan keterampilan yang ditunjang dengan penyiapan/penyediaan sarana pendidikan non format yang memadai.
 - c) Menstimulasi',mendorong, atau memotivasi rakyat agar mereka mau meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya melalui dialog dan kamPanye pendidikan.
2. Pemberdayaan Ekonomi. Akses dan penghasilan atas pendapatan bagi setiap orang merupakan hal yang penting karena menyangkut otonominya (kemandirian).memungkinkan manusia untuk mengontrol dan mengendalikan kehidupannya sesuai dengan yang mereka inginkan. Menurut Supriatna(2000 : 163), hal-hal yang perlu diperankan oleh pemerintah daeah dalam konteks pemberdayaan ekonomi rakyat adalah :
 - a. Membantu masyarakat menyediakan program-program pemberdayaan di bidang perekonomian dan kesejarteraan masyarakat,
 - b. Membantu masyarakat memfasilitasi kegiatan ekonomi masyarakat (penyediaan sarana ekonomi).
 - c. Membantu peningkatan pendapatan masyarakat melalui dorongan akses dan bantuan permodalan.

3. Pembedayaan Sosial Budaya. Dalam kehidupan masyarakat hendaknya Hal-hal yang perlu diperankan oleh pemerintah daerah dalam konteks pemberdayaan sosial budaya menurut Supriatna (2000 : 172) adalah :
 - a) Membantu dalam penyediaan sarana dan prasarana sosial budaya bagi masyarakat(sarana keagamaan, kesenian, olah raga, kesehatan,dan lain lain sarana dan prasarana umum yang diperlukan warga),
 - b) Memberikan bantuan/dana sosial dan juga mendorong partisipasi warga dalam berswadaya.
 - c) Melakukan pembinaan dalam kegiatan-kegiatan sosial budaya yang berkembang di masyarakat.
4. Pemberdayaan Psikologi. Menurut Pranarka (dalam Prijono dan Pranarka,1996: 221) menyatakan bahwa ada 2 (dua) hal pokok yang berkaitan dengan pemberdayaan psikologi masyarakat, yaitu :
 - a. Pemerintah daerah berupaya mengubah cara berpikir masyarakat yang selama ini masih konvensional ke cara berfikir yang lebih modern (sesuai perkembangan jaman), yang berarti bahwa posisi pemerintah adalah sebagai "agen pembaharuan".
 - b. Pemerintah daerah perlu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menerapkan nilai-nilai demokrasi, terutama untuk pengambilan keputusan bersama melalui musyawarah-mufakat, kegotongroyongan, saling membantu, menghargai pendapat orang lain, dan bekerjasama mencapai tujuan bersama.
5. Pemberdayaan Politik. Dalam pemberdayaan politik Menurut Adi (2001 : 183), hal-hal yang terkait dengan pemberdayaan politik yang perlu diperankan oleh pemerintah adalah adalah:
 - a) Pemerintah daerah memberikan akses/peluang yang sama bagimasyarakat dalam kegiatan-kegiatan politik.
 - b) Pemerintah daerah mendorong warga masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan politik.

Dari kelima komponen pemberdayaan masyarakat diatas, pemberdayaan pendidikan merupakan faktor kunci, sedangkan pemberdayaan yang lainnya yaitu pemberdayaan ekonomi, pemberdayaan social budaya, pemberdayaan psikologi, dan pemberdayaan politik adalah faktor Penunjang.

KESIMPULAN

Pemberdayaan Masyarakat adalah suatu proses memperoleh daya (power) melalui pengalaman, pengetahuan, sumber daya, dan kesadaran, sehingga mereka yang tak berdaya (powerless) akan mendapat kekuasaan (powerful) selain itu, membantu meningkatkan kemampuan, kapasitas, dan kesadaran masyarakat. masyarakat umum agar mempunyai Daya/kekuatan untuk menghadapi tantangan

yang dihadapinya dalam mencapai kualitas hidup yang lebih baik, sehingga mereka dapat menentukan masa depannya sendiri sesuai dengan keinginannya. Sebagai hasil dari tindakan, undang-undang, dan intervensi pemerintah, masyarakat diharapkan menjadi lebih sejahtera dan menjadi lebih mandiri. Dalam konteks perubahan program, kontribusi pemerintah adalah upaya membantu masyarakat dengan memberikan penitipan anak (seperti sumber daya keuangan, waktu, pengetahuan, dan bantuan) kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan kapasitas, kemampuan, dan diri mereka sendiri. -kesadaran dan lebih mampu menghadapi tantangan penuaan yang sedang berlangsung untuk mencapai kualitas hidup yang lebih tinggi. Psikologi sosial juga memainkan peran penting dalam memahami bagaimana sosialisasi, norma sosial, dan identitas sosial mempengaruhi perilaku individu dan kelompok. Ini mencakup pemahaman tentang bagaimana individu dan kelompok memahami dan merespons lingkungan sosial mereka, serta bagaimana mereka berinteraksi dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Dalam konteks pemberdayaan dan pembangunan masyarakat, psikologi sosial dapat digunakan untuk mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Azzahra, A. (2021). Pengembangan Teknologi Augmented Reality di Bidang Pendidikan Serta Pemberdayaan Potensi Masyarakat Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Desa Jatisari. *Proceedings Uin Sunan Gunung Djati Bandung*, 1(63), 44–54.
- Firman, A. A. (2021). Pemberdayaan Masyarakat di Desa Berbasis Komunitas: Review Literatur. *Jurnal Ilmiah Tata Sejuta STIA Mataram*, 7(1), 132–146. <https://doi.org/10.32666/tatasejuta.v7i1.196>
- Hendra, T. (2018). Profesionalisme Dakwah Dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal At-Taghyir: Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Masyarakat Desa*, 1(1), 1–10. <https://doi.org/10.24952/taghyir.v1i1.957>
- Lasiman Sugiri. (2012). Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Publica*, 2(1), 56–65.
- Masulah, R. S., & Agustina, T. S. (2021). Analisa Kebutuhan Pengembangan SDM Volunteer Tourist dengan Program Pemberdayaan Masyarakat Daerah. *PERWIRA - Jurnal Pendidikan Kewirausahaan Indonesia*, 4(2), 103–122. <https://doi.org/10.21632/perwira.4.2.103-122>
- Mustanir, A. (2019). Pemberdayaan Masyarakat Kewirausahaan. *Osf*, 1(14), 1–13. https://www.researchgate.net/publication/331311483_Pemberdayaan_Masyarakat_Kewirausahaan%0Ahttps://www.academia.edu/38428570/Pemberdayaan_Masyarakat_Kewirausahaan
- Soeprodjo, R. G. D., Ruru, J. M., & Londa, V. Y. (2020). Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Pantai Di Desa Inobonto Dua Kabupaten Bolaang Mongondow. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(89), 1–8.
- Sulistiyani, A. T., & Wulandari, Y. (2017). Proses Pemberdayaan Masyarakat Desa

Sitimulyo Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul Dalam Pembentukan Kelompok Pengelola Sampah Mandiri (KPSM). *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (Indonesian Journal of Community Engagement)*, 2(2), 146–162. <https://doi.org/10.22146/jpkm.27024>

Widyaningsih, H. (2019). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Dan Implikasinya Terhadap Sosial Budaya Di Desa Sendangagung, Minggir, Sleman. *Journal of Indonesian Tourism, Hospitality and Recreation*, 2(1), 68–76. <https://doi.org/10.17509/jjithor.v2i1.16433>